

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Adimistrasi Kabupaten Takalar.....	22
Gambar 2. Takalar 1922.....	25
Gambar 3. Takalar 1924.....	26
Gambar 4. Peta Adimistrasi Kel. Takalar Lama .....	29
Gambar 5. Persebaran Bangunan .....	50
Gambar 6. Zonasi Ruang.....	52

## DAFTAR FOTO

Foto 1. Tampak dari Depan.....	32
Foto 2. Tampak dari Arah Selatan .....	32
Foto 3. Tampak dari Arah Utara .....	32
Foto 4. Bangunan Tambahan (baru).....	32
Foto 5. Tampak dari Samping.....	33
Foto 6. Tampak dari Depan.....	33
Foto 7. Pintu, Jendela dan Ventilasi Depan .....	34
Foto 8. Pintu, Jendela dan Ventilasi Samping.....	34
Foto 9. Tampak dari Depan.....	35
Foto 10. Pintu Utama .....	35
Foto 11. Kondisi Ruang Penjara .....	35
Foto 12. Kondisi Ruang Penjagaan.....	35
Foto 13. Tampak dari Depan.....	37
Foto 14. Bangunan Baru .....	37
Foto 15. Ruang Kantor.....	37
Foto 16. Ruang Kelas .....	37
Foto 17. Kondisi Makam .....	38
Foto 18. Lingkungan Makam.....	38
Foto 19. Sampel Makam Tampak Samping.....	39
Foto 20. Sampel Makam Tampak Atas.....	39
Foto 21. Tampak dari Luar.....	40
Foto 22. Tampak dari Dalam .....	40
Foto 23. Bekas Closet .....	41
Foto 24. Bekas Bak Air.....	41
Foto 25. Tampak dari Samping.....	42
Foto 26. Tampak dari Belakang.....	42
Foto 27. Tampak dari Dalam .....	43
Foto 28. Pintu Ruangan.....	43
Foto 29. Tampak dari Depan.....	44
Foto 30. Tampak dari Samping.....	44

Foto 31. Pintu Utama .....	44
Foto 32. Jendela dan Ventilasi .....	44
Foto 33. Tampak dari Samping.....	46
Foto 34. Tampak dari Depan.....	46
Foto 35. Jendela dan ventilasi .....	46
Foto 36. Pintu Depan .....	46
Foto 37. Tampak Depan.....	47
Foto 38. Tampak Samping .....	47
Foto 39. Kondisi Ruang Depan.....	47
Foto 40. Kondisi Ruang Belakang .....	47

## ABSTRAK

**Asridhoal Afreinaldy Rasihsyah. *Bangunan Peninggalan Kolonial di Kawasan Cilallang, Kel. Takalar Lama, Kec. Mappakasunggu, Kabupaten Takalar* (dibimbing oleh Erni Erawati dan Supriadi).**

Takalar pada masa Hindia Belanda merupakan salahsatu wilayah *onderafdeling* dari wilayah *afdeling* Makassar. Berdasarkan kenampakan peta terbitan Belanda tahun 1900-an, di Kawasan Cilallang tersebar infrastuktur bangunan peninggalan masa Kolonial Hindia Belanda. Hingga saat ini infomasi maupun data dari tinggalan tersebut masih kurang diketahui dan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda dan bagaimana fungsi dari tinggalan tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan aktivitas yang terjadi pada masa itu. Kemudian dilanjutkan dengan menggambaran tata letak bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dengan menggunakan metode studi pustaka dan survey lapangan untuk menemukan dan mendeskripsikan serta dilanjutkan dengan menginterpretasikan segala data yang telah diperoleh. Data penelitian ini menunjukkan bahwa di Kawasan Cilallang terdapat sepuluh bangunan peninggalan Kolonial Hindia Belanda yang kemudian dikaji berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lima jenis bangunan, yakni: sarana transportasi, sarana keamanan, sarana pendidikan, sarana pemerintahan dan sarana pendukung yang tersebar mengikuti pola jalan yang ada pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Cilallang pada masa kolonial Hindia Belanda memiliki pengaruh ekonomi dan politik sebagai salahsatu wilayah penyanggah Kota Makassar yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu.

**Kata Kunci :** Bangunan, Takalar, Kolonial, Hindia Belanda.

## ABSTRACT

**Asridhoal Afreinaldy Rasihsyah.***Colonial Heritage Buildings in the Cilallang Area, Kel. Takalar Lama, Kec. Mapakasunggu, Takalar District*(supervised by **Erni Erawati and Supriadi**).

Takalar during the Dutch East Indies was one of the areas subcategory from the region *department* Macassar. Based on the appearance of maps published by the Netherlands in the 1900s, in the Cilallang area scattered building infrastructure from the Dutch East Indies Colonial period. Until now, information and data from these remains are still not known and researched. This study aims to determine the types of buildings left over from the Dutch East Indies colonial period and how the functions of these remains explain their relation to the activities that occurred at that time. Then it is continued by describing the layout of the buildings left over from the Dutch East Indies colonial period in the Cilallang Area, Takalar Regency. The method used to achieve the research objectives is by using literature study and field survey methods to find and describe and proceed with interpreting all the data that has been obtained. The data of this study indicate that in the Cilallang area there are ten colonial heritage buildings which were then studied based on their function divided into five types of buildings, namely: transportation facilities, security facilities, educational facilities, government facilities and supporting facilities which are scattered according to the existing road pattern on at that time. This shows that the Cilallang area during the Dutch East Indies colonial period had economic and political influence as one of the buffer areas for Makassar City which was the center of the Dutch East Indies government at that time.

**Keywords:** Building, Takalar, Colonial, Dutch East Indies.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia bertujuan untuk mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah yang dimana rempah-rempah sangat dibutuhkan di Eropa. Seiring perkembangannya, tujuan tersebut semakin besar hingga Belanda berobsesi untuk memonopoli perdagangan serta menjajah Indonesia. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia berlangsung sangat lama, yang dimana awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Kapten Pieter Keyzer dan Cornelis de Houtman pada 23 Juni 1596 berlangsung hingga tahun 1601.

Belum cukup sampai disitu, penjajahan Belanda masih terus berlanjut ke masa VOC (1602-1799), masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1806-1811), masa pemerintahan Jan Willem Janssen (1811), masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1814), masa kekuasaan Belanda ke Dua (1816-1942) yang terdiri dari kebijakan system tanam paksa (1830-1870) dan kebijakan pintu terbuka, eksploitasi manusia dan agrarian (1870-1900), hingga tiba ke masa Politik Etis (1901-1942) (Ardiansyah, 2016 :1).

Memasuki abad ke XX, Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian terhadap kaum Pribumi dan kemudian lahir Politik Etis yang dituangkan dalam *Trias Van Devender* (Politik Balas Budi oleh Belanda). Politik etis atau politik balas budi ini mencakup tiga kebijakan yaitu Migrasi, Irigasi dan Edukasi. Pada kebijakan Migrasi, Hindia Belanda memindahkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa ke

daerah-daerah lain, pada kebijakan Irigasi Hindia Belanda membangun serta memperbaiki system pengairan dan bendungan untuk bidang pertanian dan pada kebijakan Edukasi Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi kaum pribumi dengan membangun sekolah-sekolah. Namun pada kenyataannya, politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi (Susilo, 2018 :403).

Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, pemerintah Hindia Belanda melihat Sulawesi Selatan memiliki bentang alam yang beragam sebagai daerah penghasil komoditi yang layak jual. Komoditas andalan yang terdapat di wilayah ini berupa beras, jagung, kopi, kopra maupun komoditas lainnya (Nur, 2016 :617). Hal tersebut membuat Hindia Belanda menilai bahwa wilayah Sulawesi selatan memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keuntungannya di pasar internasional.

Perluasan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tidak terlepas dari konflik dengan pemerintah lokal yang berada di daerah-daerah tempat perluasan dilakukan. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha perluasan wilayah dengan mengirim pasukan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan tersebut dikenal dengan istilah Ekspedisi Militer (*Militaire Exspeditie*) 1905. Ekspedisi ini dilakukan berdasarkan kebijakan politik yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1904-1909, Joannes Benecditus van Heutzs (Amri, 2021 :145).

Khususnya di Sulawesi selatan, kerajaan-kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan saat itu memandang bahwa perluasan pengaruh dan kekuasaan oleh

Belanda lambat laun akan memudarkan pengaruh dan wibawa dari para petinggi kerajaan, sehingga perluasan kekuasaan Belanda tersebut mendapatkan perlawanan yang gigih dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Dengan banyaknya perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penaklukan dengan mengirimkan pasukan ekspedisi militer ke kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) merupakan salah satu kerajaan yang kehilangan sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya daerah yang berada di bawah kekuasaannya.

Seiring dengan usaha penaklukan dengan ekspedisi militer yang dilakukan oleh Hindia Belanda untuk menguasai wilayah Sulawesi Selatan, penguasa-penguasa lokal pada saat itu dipaksa untuk mengakui kekuasaan Hindia Belanda dengan menandatangani sebuah pernyataan pendek (*korte verklaring*) yang berisikan bahwa penguasa kerajaan mengakui kedudukan kekuasaan Hindia Belanda atas wilayahnya dan memberi kesetiaan serta ketaatan atas peraturan dan kebijakan Hindia Belanda (Attoriolong, 2020 :1).

Setelah menguasai wilayah Sulawesi Selatan, Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun sarana dan prasarana di beberapa wilayah kerajaan yang telah ia taklukkan untuk kemajuan ekonomi dan kepentingan politiknya. Kemudian Pemerintahan Hindia Belanda membagi-bagi wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan ke dalam beberapa tingkatan administrasi seperti *Afdeeling* dan *Onderafdeling*. *Afdeeling* atau afdeling merupakan wilayah administrasi setingkat kabupaten yang membawahi beberapa *onderafdeling* (Laely, 2018 :13).

Dimasa pemerintahan Hindia - Belanda, Takalar berstatus sebagai *Onderafdeling* yang tergabung dalam daerah *Afdeling* Makassar bersama-sama dengan *Onderafdelig* Gowa, *Onderafdeling* Maros, *Onderafdeling* Pangkajene Kepulauan dan *Onderafdeling* Jenepono. *Onderafdeling* Takalar, membawahi beberapa district atau *gemenschap*, yaitu District Polobangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap district diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Dalam menjalankan kekuasaannya di wilayah *onderafdeling* Takalar saat itu, Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitasnya dalam menjalankan kekuasaan loji-loji perdagangan dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti jaringan jalan, jaringan kereta api, jembatan dan lain-lain demi mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahannya. Salah satu langkah awal bagi Hindia Belanda untuk menghubungkan antara Makassar dan Takalar adalah membangun sebuah jaringan rel kereta api sepanjang 47 kilometer dan sebanyak 20 tempat pemberhentian resmi atau stasiun yang dijelaskan oleh Fadli Nasrul, 2018 dalam tulisannya yang berjudul "Tinggalan Perkeretaapian di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Takalar" (Nasrul, 2018 :1-11).

Pembangunan jaringan rel kereta api Makassar-Takalar dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi dan kesulitan pengangkutan komoditi pada saat itu, yang dimana wilayah Takalar merupakan daerah penghasil komoditi yang laku

dipasarkan, diantaranya yaitu beras, kopra, tebu dan lain-lain yang dapat memenuhi kebutuhan ekspor Hindia Belanda di pasar Internasional. Menjalankan pengangkutan hasil komoditi menggunakan jalan yang ada, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tinggi karena pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat angkut tradisional bertenaga hewan serta seringnya terjadi kerusakan gerobak dan beresiko terhadap kematian hewan yang digunakan sebagai penarik gerobak, sehingga Hindia Belanda membutuhkan sarana transportasi yang lebih modern dan mempunyai daya angkut yang besar untuk mengangkut komoditi dari daerah pedalaman ke kota Pelabuhan (Natsir, 2016 : 93).

Selain masalah ekonomi dalam kesulitan pengangkutan komoditi, pembangunan jaringan rel kereta api juga dilatarbelakangi oleh politik Hindia Belanda dalam memepertahankan wilayahnya. Hal tersebut merupakan strategi militer Hindia Belanda untuk memobilisasi serdadu atau tentara dalam upayanya meredam gerakan perbanditan dan pemberontakan yang marak terjadi di wilayah pedalaman Gowa dan Takalar. Salah satunya ialah gerakan I Tolok Dg Magassing yang merupakan gerakan perbanditan yang berpusat di daerah Polongbangkeng, Takalar (Natsir, 2016 :107).

Peninggalan-peninggalan pada masa kolonial Hindia Belanda begitu banyak tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap peninggalan Hindia Belanda yang terdapat di suatu wilayah, memiliki peran penting bagi kelancaran aktivitas Hindia Belanda dalam menjalankan kekuasaannya terhadap wilayah Sulawesi Selatan pada saat itu. Hal tersebutlah

yang menarik minat banyak para peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian terkait masa kedudukan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan.

Adapun penelitian-penelitian mengenaiinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Sulawesi Selatan yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Syahrudin Masyur (2002) dengan skripsi yang berjudul “Kota Makassar Akhir Abad XVII Hingga Awal Abad XX (Suatu Studi Arkeologi Ruang)”, Suhartiyah Umar (2003) dengan skripsi yang berjudul “Peninggalan Bangunan-bangunan Kolonial di dalam Fort Rotterdam”, SURIANTI (2003) dengan skripsi yang berjudul “Arsitektur Bangunan Kolonial Pengadilan Negeri Makassar”, Aldi Mulyadi (1999) dengan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Situs Fort Rotterdam (Kajian *Cultural Resource Management*)”, Afandi Syarif (2007) dengan skripsi yang berjudul “Perkembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar Tahun 1924-2006 (Studi Arkeologi Industri)”, Rahmawati (2003) dengan skripsi yang berjudul “Teknik Konservasi dan Dampaknya terhadap Dinding Barat Benteng Rotterdam”, dll (Natsir, 2016 :1-2).

Selain itu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan pada tahun 2013 telah membuat laporan berbentuk sebuah buku tentang bangunan bersejarah yang terdapat di Kota Makassar, laporan tersebut merupakan upaya publikasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan tujuan untuk mempublikasikaninggalan kepurbakalaan yang terkhusus pada bangunan kolonial yang meliputi Fasilitas Pemerintahan, Layanan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Layanan Pendidikan, Tempat Ibadah, Sarana Rekreasi dan Rumah Tinggal. Buku tersebut menyajikan kondisi kekinian

bangunan tersebut dan diharapkan bisa menjadi rujukan dalam upaya pelestarian serta kajian tinggalkan kepurbakalaan di Kota Makassar yang terkhusus pada bangunan bersejarah (BPCB, 2013).

Terkhusus pada Wilayah Takalar sendiri, penelitian yang membahas mengenai peninggalan masa kolonial Hindia Belanda, hanya pernah dilakukan oleh Zulkifly Natsir pada tahun 2016 yang membahas tentang Tinggalan Perkeretaapian di Kota Makassar, Gowa dan Takalar. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifly Natsir tersebut difokuskan pada bangunan-bangunan di Takalar yang memiliki hubungan dengan Transportasi Kereta Api yang terdapat di Sulawesi Selatan pada saat itu.

Terlepas dari itu, terdapat pula beberapa tulisan yang didalamnya sedikit membahas mengenai masa Hindia Belanda maupun aktivitas masyarakat pada saat itu yang berhubungan dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Takalar. Adapun beberapa tulisan tersebut, antara lain :

Pradimara (2017) dalam tulisannya yang berjudul “Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19” menerangkan mengenai wilayah-wilayah yang dikuasai langsung oleh penguasa kolonial. Pada wilayah Sulawesi Selatan, yang diatur salah satunya pada saat itu adalah kota Makassar yang merupakan wilayah kekuasaan langsung, terbagi dengan wilayah *district* Makassar, di bagian selatan *district* Takalar serta *district* bagian utara Maros. Wilayah kekuasaan langsung tetap dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan untuk *district* Makassar dikelola oleh seorang *magistraat* atau seorang residen dan untuk *district*

lainnya didampingi oleh seorang *regend* atau penguasa pribumi dan kepala-kepala desa atau kampung (Pradimara, 2017 : 56-70).

Husin (2017) dalam tulisannya yang berjudul “Pembentukan Jaringan Ekonomi Pelabuhan Makassar awal abad ke 19” menjelaskan bahwa pada abad 17 hingga 18 terdapat sebuah kegiatan perdagangan beras yang berlangsung di daerah-daerah pesisir pantai Sulawesi Selatan, yakni pada daerah sebelah utara, yaitu Maros dan Pangkajene serta pada daerah timur yang berasal dari daerah Takalar, Bantaeng dan Bulukumba. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai daerah lumbung padi dan memiliki areal pertanian yang luas serta sistem irigasi yang baik (Husin, 2017 : 204-209).

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Musyaqqat (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Jaringan Perdagangan Beras dan Dinamika Pelabuhan Ekspor di Sulawesi Selatan pada 1930-an”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa pada abad ke 17, budi daya padi di Sulawesi Selatan umumnya dilakukan di sawah dan ladang-ladang yang dapat dijumpai di berbagai daerah, seperti Bone, Pare-pare, Takalar, Gowa, Maros dan Pangkajene. Beras pada saat itu, sempat menjadi komoditas ekspor utama di Sulawesi Selatan, adapun situasi tersebut tidak terlepas dari dukungan daerah pedalaman makassar yaitu Takalar dan Maros yang terkenal sebagai lumbung padi untuk perdagangan Makassar (Musyaqqat, 2021 : 113-134).

Pada tulisan Ahmadin (2011) dengan judul “Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial (Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar)”, menerangkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pernah melaksanakan sensus penduduk pada tahun 1930 di Sulawesi Selatan. Menurut keterangan Harvey

(1989), pada tulisan tersebut menjelaskan bahwa penduduk *Afdeling* Makassar berjumlah 672.365 orang yang terdiri dari berbagai etnis dan kelompok etnis terbanyak yaitu Makassar dengan jumlah 487.012 orang yang juga mendiami beberapa daerah diantaranya, yaitu Gowa, Takalar, Jeneponto serta Sebagian Maros dan Pangkep (Ahmadin, 2011 : 41-42).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkhusus pada wilayah Takalar, sejauh pengetahuan penulis belum ada sebuah sumber tulisan yang membahas atau menerangkan mengenai bangunan-bangunan peninggalan Hindia Belanda serta aktivitas Hindia Belanda dalam menjalankan kekuasaannya pada saat itu di Wilayah Takalar. Terkhusus pada penelitian kali ini, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai bangunan-bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar yang merupakan pusat kota Takalar pada masa itu, kemudian penulis akan mencoba menggambarkan tata letak tinggalan tersebut serta menerangkan mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi pada saat itu melalui fungsi dari bangunan-bangunan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu wilayah yang diduduki oleh pemerintahan Hindia Belanda ialah Kabupaten Talalar. Kemudian dibangunlah sarana dan prasarana demi mendukung aktivitas pemerintahannya pada saat itu. Sarana dan prasarana tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki peran penting sebagai wilayah *onderafdeeling* penyanggah *afdeeling* Makassar pada masa itu dan memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya penelitian-penelitian mengenai tinggalan kolonial di wilayah tersebut.

Penelitian mengenai peninggalan Kolonial Hindia Belanda di Wilayah Takalar masih sangat minim dilakukan, Sedangkan Wilayah Takalar merupakan salahsatu *Onderafdeling* terdekat dari *Afdeling* Makassar yang merupakan Pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada saat itu. Hal tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk mencoba menelusuri terkait sebaran bangunan peninggalan hindia belanda, menggambarkan tata letak setiap tinggalan yang ada dalam bentuk sebuah peta serta mencoba menerangkan aktivitas Hindia Belanda pada saat itu melalui fungsi bangunan yang ada, yang saat ini difokuskan pada Kawasan Cilallang, Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Berlandaskan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam terkait peninggalan masa kolonial Hindia Belanda, khususnya di Kawasan Cilallang Kabupaten Takalar demi mengungkap maupun merekonstruksi sejarah masa kolonial Hindia Belanda pada saat itu.

Beranjak dari pemikiran itu, timbullah beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa jenis bangunan tinggalan masa kolonial yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana gambaran tata letak dan zonasi ruang dari bangunan tinggalan masa kolonial yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana fungsi tinggalan tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan aktivitas yang terjadi pada masa itu ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setelah melihat permasalahan yang ada, penulis mengacu pada salah satu dari tiga tujuan utama dalam ilmu arkeologi yaitu merekonstruksi sejarah budaya, khususnya kolonialisasi yang terdapat pada kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar. Maka dari itu, timbullah tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan**

- a. Mengklasifikasi jenis tinggalan yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar.
- b. Mengetahui gambaran tata letak dan zonasi ruang dari bangunan tinggalan masa kolonial yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar.
- c. Mengetahui bagaimana fungsi tinggalan tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan aktivitas yang terjadi pada masa itu.

#### **1.3.2 Manfaat**

Dari tujuan yang telah teruraikan diatas, maka terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, yakni mengetahui segala tinggalan kolonial yang terdapat di Kawasan Cilallang, mengetahui fungsi dan keterkaitan tinggalan tersebut terhadap aktivitas saat itu serta mengetahui tata letak dan zonasi ruang dari bangunan peninggalan Kolonial yang terdapat di Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar.
2. Manfaat Praktis, yakni sebagai media perekaman data arkeologi serta dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian kolonial kedepannya yang terkhusus di Kabupaten Takalar.

#### **1.4 Penelitian Serupa**

Penelitian mengenai kota peninggalan Hindia Belanda telah menjadi isu yang menarik bagi para peneliti. Berbagai penelitian telah dilakukan di seluruh penjuru di Indonesia. Baik yang dilakukan oleh akademisi dari bidang arkeologi maupun bidang ilmu lainnya. Berikut beberapa penelitian yang serupa dengan isu penelitian yang ditawarkan oleh penulis :

Hidayah (2017) telah melakukan penelitian mengenai tata kolonial di Kediri. Tujuan penelitian ini ialah melihat pengaruh Sungai Brantas terhadap penataan kota Kediri dan perubahan penataan kota Kediri dari kota sungai ke kota darat pada tahun 1906-1942. Menggunakan metode sejarah heuristik verifikasi kritik ekstern dan intern dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Sungai Brantas mempengaruhi penataan kota Kediri karena letaknya yang membelah wilayah Kediri menjadi dua bagian Barat dan Timur. Akibat terjadi pendangkalan Sungai Brantas dan beralihnya sistem transportasi menggunakan jalur darat. Penataan Kota Kediri mendapat pengaruh dari adanya jalur kereta api. Hal ini dikarenakan letak stasiun Kediri yang berada ditengah-tengah kota yang dapat menjangkau semua wilayah. Dimana didekat stasiun ini terdapat pemukiman pasar pertokoan gereja masjid bank dan lain-lain. Muatan edukasi dari penataan Kota Kediri dari kota sungai ke kota darat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marzuki (2018) di Kota Gorontalo. Salah satu isu yang diangkat ialah perkembangan morfologi kota Gorontalo pada masa kolonial serta faktor yang melatar belakangi

perkembangannya. Menggunakan kajian arkeologi perkotaan dengan fokus komponen kota, tata kota, konsep hingga kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan pada masa kolonial pusat kota pindah ke arah selatan mengacu aturan *law of indies*.

Tulisan selanjutnya oleh Muhajir (2019) yang berjudul Tata Kota Parepare Periode Kolonial Belanda yang diterbitkan pada Jurnal Wallanae. Isu penelitian untuk melihat bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penentuan dimensi bangunan Kolonial berdasarkan prasasti, naskah dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kota Parepare terdiri dari tiga zona yakni zona inti oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan, zona kawasan pecinan, diperuntukkan untuk kegiatan perekonomian dan zona pemukiman pribumi. Faktor yang dominan mempengaruhi bentuk kota Parepare adalah faktor geo-politik dan keamanan, untuk menjaga kondusifnya wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hermawan (2020) dengan tajuk Pola Tata Ruang Weltevreden dan Fungsi Ruang Kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan tata ruang kota Weltevreden sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan keruangan. Pembangunan Weltevreden menjadi pusat pemerintahan karena dianggap lebih memadai dari aspek kesehatan di bandingkan kawasan

Batavia. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat dengan titik pusat di Waterlooplein.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arta (2021) di Kota Singaraja dengan judul Penataan Kota Singaraja Zaman Kolonial Belanda (Perspektif Sejarah Kota). Menggunakan metode heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi untuk mengetahui tentang kosepsi dan tata ruang yang berciri tradisional di Kerajaan Buleleng dan landscape Kota Singaraja sebagai kota kolonial Belanda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landscape kota Singaraja dibangun berdasarkan perpaduan landscape tradisional (geo-religius) dengan landscape modern yang berorientasi pada kehidupan duniawi, sifat rasional ini ditunjukkan dengan adanya sanitasi lingkungan, jalan raya besar untuk transportasi modern, tempat hiburan, sekolah, pusat tentara, penjara, pengadilan dan wujud orientasi dunia barat lainnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Laely (2018). yang membahas mengenai sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di *onderafdeling* Bonthain pada tahun 1905-1942. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada metode sejarah, melalui tahap : *heuristic*, kritik, interpretasi dan historiografi untuk menemukan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kearsipan dan tinjauan kepustakaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *onderafdeling* Bonthain mengakibatkan terjadinya proses perubahan structural dari struktur politik dan ekonomi tradisional yang selanjutnya mengarah ke struktur politik dan ekonomi kolonial modern.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) yang diterbitkan pada jurnal *pattingalloang*, membahas mengenai politik etis kerajaan Soppeng 1905-1942. Tuisan tersebut menjelaskan mengenai latar belakang penerapan politik etis di kerajaan Soppeng serta bentuk penerapan dan dampak dari politik etis tersebut. Adapun metode yang dilakukan yaitu metode penelitian sejarah dengan tahapan *heuristic*, kritik sumber, interpretasi dan historiografi yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan, wawancara, pengumpulan arsip serta literatur yang berkaitan. Tulisan tersebut menjelaskan, pada masa kekuasaan Hindia Belanda di Soppeng, ia menerapkan kebijakan politik etis yang meliputi pembangunan 14 sekolah dan pembangunan 12 irigasi. Hal tersebut dinilai memberikan dampak positif pada pribumi pada saat itu. Melihat kondisi masyarakat yang terbelakang dalam bidang pengetahuan serta memiliki wilayah pertanian dan pertanian yang subur sehingga menjadi perhatian Hindia Belanda untuk mengajarkan konsep Pendidikan formal serta tata cara mengelola pertanian dengan modern. Namun hal tersebut juga memiliki dampak negatif bagi budaya masyarakat yang banyak mengalami perubahan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mansyur (2002) yang membahas mengenai pertumbuhan Kota Makassar pada akhir abad XVII hingga awal abad XX. Penelitian tersebut mengungkap bahwa pertumbuhan Kota Makassar pada Masa Kolonial sangat dipengaruhi oleh keadaan politik, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat pada saat itu.

Penelitian serupa lainnya telah dilakukan oleh Burhan (2010) yang membahas mengenai struktur kota Jeneponto Lama tahun 1904-1942. Penelitian

tersebut mengungkap bahwa Pemerintah Hindia Belanda memiliki peran yang besar dalam penciptaan pola keruangan kota Jeneponto Lama, yang dimana hal tersebut terlihat pada pusat kota yang didominasi oleh bangunan pemerintahan dan pemukiman Hindia Belanda. Adapun pada bagian luar pusat kota terdapat pasar dan kios-kios pertokoan komunitas dari China dan pada zona lainnya terdapat kampung-kampung yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, petani dan penambang pasir.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lendrawati (2010) yang membahas mengenai Pemukiman masa kolonial di Kota Banteng Kabupaten Selayar. Penelitian tersebut mengungkap bahwa pada Kabupaten Selayar, tata ruang Kota pada periode kolonial telah terencana dengan baik yang ditunjukkan dengan pola sebaran pemukiman yang tersebar mengikuti jalan yang memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai serta terdapat pembagian fungsi ruang kota yang diletakkan berdekatan agar memudahkan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Selanjutnya sebuah buku yang ditulis oleh Mahmud (2003) yang membahas mengenai Kota Kuno Palopo : Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi. Buku tersebut mengungkap bahwa pada masa kedudukan Hindia Belanda, ia memiliki beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penataan struktur ruang kota Palopo. Pada saat itu terjadi pertumbuhan bagi struktur kota secara signifikan dengan dibangunnya pasar dan rumah jabatan pada alun-alun istana kerajaan dan diubahnya bentuk istana kerajaan menjadi bangunan dengan arsitektur Eropa serta di bangunnya sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja pada sisi barat istana

kerajaan. Kemudian pada sisi timur istana kerajaan juga dibangun sebuah Pelabuhan dan Gudang.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode merupakan serangkaian Tindakan ataupun tata cara yang dilakukan untuk mengungkap ataupun menjelaskan suatu masalah dengan landasan kerangka berfikir tertentu yang sistematis. Guna menghasilkan data dari objek yang akan diteliti dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis merujuk pada teori James Deetz (1967) yang menggambarkan tiga tingkatan dalam penelitian arkeologi, mulai dari tahap observasi, deskripsi, hingga eksplanasi. Olehnya itu, secara garis besar metode yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi data.

### **1.5.1 Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data pustaka dan pengumpulan data lapangan dengan melakukan survei terhadap objek yang diteliti.

#### **1. Data Pustaka**

Tahap paling awal yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu melakukan pencarian dan pengumpulan data pustaka. Data pustaka yang penulis kumpulkan bersumber dari dari skripsi, tesis, disertasi dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini baik yang penulis dapatkan di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, skripsi-

skripsi di Laboratorium Arkeologi maupun di perpustakaan Balai Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu penulis juga mencari referensi terkait dari internet berupa jurnal penelitian dan artikel. Hasil dari penelusuran data pustaka memberikan informasi yang kemudian dijadikan sebagai rujukan oleh penulis dalam menyusun rencana penelitian ini.

## 2. Survei Lapangan

Setelah tahap pengumpulan data pustaka, tahap selanjutnya yaitu survei lapangan. Pada tahap ini penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh data terhadap objek yang akan diteliti. Pertama-tama penulis melakukan pengurusan izin lokasi, manajemen tim dan biaya serta mengumpulkan peralatan penelitian berupa, GPS, kamera, roll meter, disto, alat tulis dan skala gambar 50 dan 100 cm. deskripsi.

Survei dilakukan pada tanggal 21-23 oktober 2022 di Kawasan Cilallang, Kel. Takalar Lama, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar yang berlangsung selama tiga hari. Survei dilakukan dengan cara menyusuri Jalan Poros, Jalan Setapak, Sawah, saluran irigasi maupun gang-gang kecil yang terdapat di Kawasan Cilallang. Setelah menemukan objek penelitian, kemudian dilakukanlah *ploting area*, pendeskripsian objek dan lingkungan, pengukuran bangunan serta mengabadikan objek melalui pemotretan dan penggambaran.

Pada Survei yang dilakukan selama tiga hari tersebut, tim menemukan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda

yang merupakan objek penelitian kali ini. Adapun objek yang dimaksud antara lain : ex Kantor Kontrolir, ex Kantor polisi, ex Rumah Jabatan Kepala Polisi, ex Stasiun Kereta Api, ex Rumah Dinas Kepala Stasiun, Sekolah Rakyat, Penjara, Makam Kolonial, Penampungan Air, wc umum dan dapur umum.

### 3. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*opened interview*). Metode ini dipilih agar informan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan leluasa dan bebas. Sebelum melakukan wawancara, penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan terkait permasalahan penelitian. Dalam memilih informan, penulis akan memilih informan yang dianggap dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Informan yang akan diwawancarai berasal dari berbagai kalangan baik itu akademisi, peneliti, tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat yang ada pada wilayah penelitian.

#### **1.5.2 Pengolahan Data**

Pada tahap pengolahan data, hasil data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil survei lapangan kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya diolah berdasarkan dengan kebutuhan. Setelah itu kemudian data tersebut diidentifikasi berdasarkan fungsinya kemudian diklasifikasi berdasarkan jenis dan keletakan administrasinya.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan peta keletakan setiap bangunan yang menjadi objek penelitian yang terdapat di Kawasan Cilallang,

Kabupaten Takalar menggunakan *software* Arc Gis, dll untuk melihat dengan jelas tata letak persebaran bangunan Kolonial Hindia Belanda yang terdapat di Kawasan Cilallang.

### **1.5.3 Interpretasi Data**

Metode ini merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari data yang telah diolah ke dalam bentuk uraian lengkap dan jelas dengan menggunakan data arkeologis yang kemudian didukung dengan data historis melalui pendekatan *material culture* dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan atas pertanyaan penelitian. Untuk itu, penelitian ini penulis menggunakan penalaran induktif karena diawali dengan mendeskripsikan bangunan yang ada di kawasan Cilallang, Takalar kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 Pendahuluan**

Berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berisikan tentang profil wilayah Kabupaten Takalar dan terkhusus pada lokasi penelitian seperti kondisi lingkungan pada lokasi penelitian, sejarah singkat Kabupaten Takalar serta berisikan mengenai penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

### **Bab 3 Deskripsi Data**

Berisikan tentang hasil data lapangan yang dikumpulkan dan telah dinarasikan oleh penulis.

#### **Bab 4 Jenis, Fungsi dan Keletakan**

Berisikan tentang hasil pengolahan data

#### **Bab 5 Penutup**

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.7 Signifikansi dan Hasil yang Diharapkan**

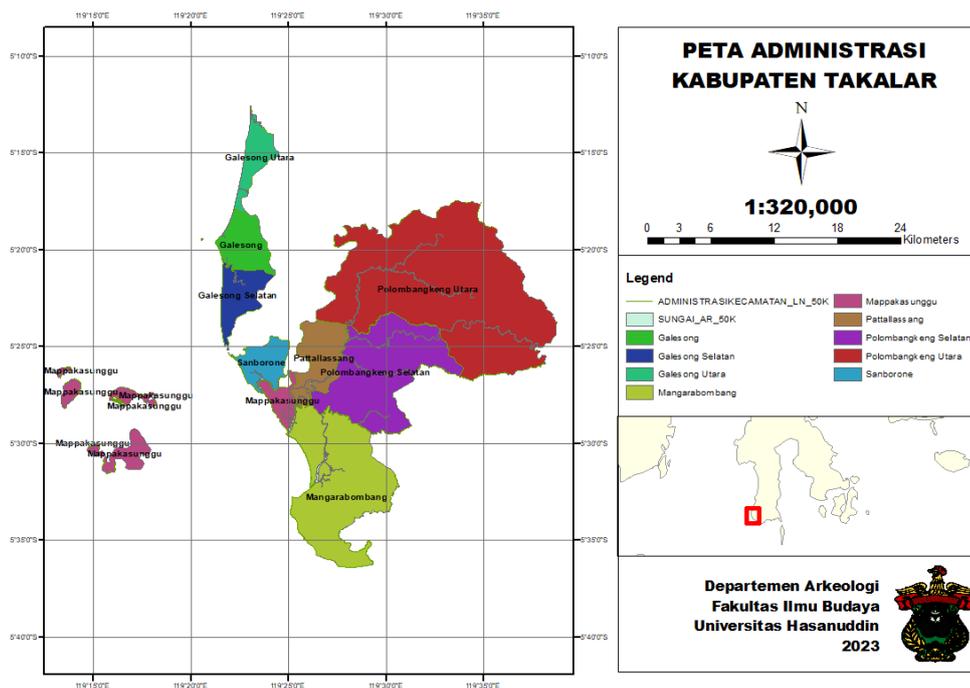
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah wawasan terkait tinggalan arkeologis pada masa kolonial Belanda di Kabupaten Takalar serta bagaimana kegunaan dan gambaran kehidupan pada masa tersebut dapat dilihat melalui tinggalan-tinggalannya.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Provil Wilayah Kabupaten Takalar

Secara astronomis Kabupaten Takalar terletak antara  $5^{\circ} 3' - 5^{\circ} 38' \text{ LS}$  dan  $119^{\circ} 22' - 119^{\circ} 39' \text{ BT}$  dan berdasarkan posisi geografis Kabupaten Takalar, pada Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa serta Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 1. Peta Adimistrasi Kabupaten Takalar  
( Dok. Asridhoal Afreinaldy R, 2023 )

Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten dilingkup wilayah Sulawesi Selatan dengan ibukota Pattalassang dan merupakan salah satu wilayah penyanggah

kota Makassar, yang dimana kota Makassar merupakan Ibu Kota sekaligus pusat perekonomian di Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Tengah.

Wilayah Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km<sup>2</sup>, terdiri atas 76 desa, 24 kelurahan yang terdiri dari 331 dusun dan 113 lingkungan. Wilayah Kabupaten Takalar terbagi atas 9 kecamatan yang diantaranya yaitu, Kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Pattalassang, Galesong, Galesong Selatan dan Galesong Utara.

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri atas tiga bagian yaitu daerah pantai, daratan dan perbukitan yang dimana terdiri dari kawasan Hutan, Sawah, Tambak, Tegalan, Perkebunan, Pekarangan dan lain-lain. Pada bagian Barat Kabupaten Takalar merupakan daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 m dan ketinggian yang bervariasi antara 0-25 m. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir dengan panjang garis pantai 74 km.

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilaliri oleh 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu, Sungai Jenemarrung, Sungai Pappa dan Sungai Palleko yang dimana 4 sungai diantara 6 sungai tersebut telah dibuat bendungan yang digunakan untuk irigasi sawah yaitu sungai Pappa, sungai Palleko, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung.

Secara Klimatologi, Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dimana musim hujan biasanya berlangsung antara bulan November hingga bulan Mei (BPS, 2022).

## 2.2 Sejarah Singkat Kabupaten Takalar

Setelah menguasai wilayah Sulawesi Selatan, Pemerintah Hindia - Belanda membagi-bagi wilayahnya ke dalam beberapa tingkatan administrasi seperti *Afdeeling* dan *Onderafdeling*. *Afdeeling* atau afdeling merupakan wilayah administrasi setingkat kabupaten yang membawahi beberapa *onderafdeling*. Salah satunya ialah Takalar. Dimasa pemerintahan Hindia - Belanda, Takalar berstatus sebagai *Onderafdeling* yang tergabung dalam daerah *Afdeling* Makassar bersama-sama dengan *Onderafdelig* Gowa, *Onderafdeling* Maros, *Onderafdeling* Pangkajene Kepulauan dan *Onderafdeling* Jeneponto. *Onderafdeling* Takalar, membawahi beberapa district atau *gemenschap*, yaitu District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang dan District Sanrobone. Setiap district diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Dalam menjalankan sistem perdagangan dan sistem pemerintahannya di wilayah di Sulawesi Selatan, Pemerintah Hindia - Belanda mulai membangun dan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitasnya dalam menjalankan kekuasaan loji-loji perdagangan dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti jaringan jalan, jembatan, jaringan kereta api, maupun bangunan-bangunan pemerintahan demi mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahannya pada saat itu.

Hal tersebut terlihat pada peta keluaran 1922 terbitan belanda yang menunjukkan bahwa pada Kawasan Cilallang, Kabupaten Takalar terdapat sebuah





Gambar 3. Takalar 1924  
(Sumber : media-kitlv)

Dari kenampakan peta keluaran tahun 1922 dan 1924 tersebut memperlihatkan bahwa pada saat itu telah ada jaringan jalan yang menghubungkan Makassar-Takalar dan terdapat sebuah pemukiman yang dibangun oleh Hindia Belanda dengan persebaran bangunan yang mengikuti pola jalan tersebut yang menyerupai gaya tata kota eropa pada masa itu. Dari kenampakan peta tersebut juga memperlihatkan bahwa pemukiman pada kota Takalar saat itu dikelilingi oleh sebagian besar area persawahan dan juga rawa.

Salah satu langkah awal bagi Hindia – Belanda untuk menghubungkan antara Makassar dan Takalar pada saat itu adalah membangun sebuah jaringan rel kereta api sepanjang 47 kilometer dan sebanyak 20 tempat pemberhentian resmi atau stasiun. Tempat pemberhentian tersebut terdiri dari 8 *halte* (Stasiun) dan 12 *Stopplats* (*halte*), yang terbagi di sepanjang jalur rel kereta api tersebut. Jarak antara stasiun maupun halte pada daerah Makassar lebih padat, yaitu sekitar 1-2 Km dibandingkan dengan yang terdapat pada daerah Gowa maupun Takalar yang berjarak sekitar 4-5 Km tiap lokasinya (Nasrul, 2018 : 8).

Jaringan rel kereta api Makassar-Takalar awalnya direncanakan bukan mengarah ke Takalar, tapi untuk menghubungkan Makassar-Maros-Tanete-Parepare hingga ke Singkang dan direncanakan akan menghubungkan seluruh wilayah Sulawesi. Meskipun rute awal pembangunan jaringan rel kereta api tersebut adalah Makassar-Maros, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan rute menuju ke Takalar yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dan politik pada saat itu.

Menghadapi keadaan ekonomi dan politik pada awal perancangan jaringan kereta api tersebut, juga terdapat dua hal yang melatarbelakangi berubahnya rute kereta api Makassar-Maros menjadi Makassar-Takalar, yaitu wilayah Gowa dan Takalar dinilai sebagai daerah penghasil komoditi yang layak dan laku dipasaran pada saat itu, yakni daerah penghasil kopra, gula dan beras. Selain itu, diubahnya rute kereta api menuju ke Takalar juga merupakan bagian dari strategi militer Hindia Belanda untuk memobilisasi serdadu atau tentara dalam upayanya untuk meredam gerakan-gerakan pemberontakan dan perbanditan yang marak terjadi di wilayah Gowa-Takalar, salah satunya adalah gerakan I Tolok Dg Magassing yang merupakan gerakan perbanditan yang berpusat di daerah Polongbangkeng, Takalar (Nasrul, 2018 : 7).

Seiring perkembangan pembangunan jaringan rel kereta api rute Makassar-Takalar, akhirnya resmi dibuka pada tahun 1922. Pada masa pengoperasiannya, kereta api tersebut digunakan untuk memobilisasi beras, gula kopra, sayur-sayuran dan sebagai angkutan umum bagi masyarakat. Namun, masa pengoperasian kereta api tersebut hanya berlangsung selama 8 (delapan) tahun, tepatnya pada tahun 1930

kereta api rute Makassar-Takalar akhirnya diberhentikan karena kondisi ekonomi Hindia Belanda sedang tidak stabil pada saat itu dan hingga saat ini rel kereta api tersebut sudah tidak pernah beroperasi lagi dan tinggal menjadi sejarah mengenai perkeretaapian pertama di Pulau Sulawesi.